

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2022

Fatih Daffa Razani ¹⁾, Adam Zakaria ²⁾, Ratna Anggraini ³⁾

Universitas Negeri Jakarta

Correspondence		
Email: fatih.daffa.r@gmail.com ¹⁾	No. Telp:	
Submitted 19 Juni 2024	Accepted 24 Juni 2024	Published 25 Juni 2024

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan guna menguji pengaruh PAD, dana perimbangan, serta jumlah penduduk pada belanja daerah pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah Tahun 2020-2022. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni deskriptif kuantitatif memakai analisis regresi data panel dengan alat bantu perangkat lunak Eviews 12. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* melalui *sampling* jenuh, sehingga sampel penelitian ini mencakup 29 kabupaten serta 6 kota di Prov. Jawa Tengah. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial PAD, dana perimbangan, serta jumlah penduduk memiliki pengaruh positif serta signifikan pada belanja daerah pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah tahun 2020-2022.

Kata Kunci: Belanja Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Jumlah Penduduk

Pendahuluan

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 1.905 juta kilometer persegi yang mempunyai 270 juta penduduk yang ada di 38 provinsi. Dengan luas dan keberagaman Indonesia menimbulkan tantangan yang rumit dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif baik pusat maupun daerah dalam rangka mencapai tujuan bangsa. Republik Indonesia terus mencari bentuk terbaik dalam konstruksi pemerintah daerah.

Pada tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah diperbarui melalui Undang-Undang, yaitu UU No. 32 tahun 2004 serta UU No. 33 tahun 2004. UU. No. 32 tahun 2004 menegaskan yakni Pemda dilaksanakan dengan prinsip otonomi. Tujuannya adalah untuk menaikkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk pembangunan yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Otonomi daerah memberi peluang bagi setiap daerah guna mengatur serta mengurus daerahnya sendiri demi menaikkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan pemerintahan.

Konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal dan moneter nasional kepada pemerintah daerah (Hadi & Saragih, 2013). Desentralisasi fiskal di Indonesia berfokus pada desentralisasi pengeluaran, yang berarti perhatian utama diberikan pada belanja daerah yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Daerah mempunyai wewenang yang luas guna melakukan aturan pengeluaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pada tahun 2020, Belanja Daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terjadi penurunan yakni 5,55% dari tahun lalu. Penurunan tersebut sejalan dengan pandemi Covid-19 dan akibat dari *refocusing* anggaran dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Tahun berikutnya belanja daerah kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah berturut-turut tumbuh secara positif yaitu 7,74% pada tahun 2021. Pertumbuhan positif di tahun 2021 disebabkan peningkatan pada belanja langsung, dimana belanja modal meningkat 25,15% serta belanja barang dan jasa meningkat 13,69%. Pada pos belanja langsung hanya belanja pegawai yang terjadi penurunan yakni 40,33%. Sementara itu belanja tidak langsung serta mengalami

kenaikan yakni 5,57%. Kota/Kabupaten di Prov. Jawa Tengah pada tahun 2021, porsi belanja barang serta jasa mencapai 24,771% , belanja modal 13,702% , belanja pegawai 2,468%, dan sisanya belanja tidak langsung 59,059%. Komposisi ini hampir seimbang selama dua tahun realisasi pada tahun 2019, 2020 dan anggaran di tahun 2021.

Kebijakan keuangan daerah di Indonesia difokuskan pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaku sumber utama pendapatan regional. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan oleh daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan serta pembangunan selaras dengan kebutuhan, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Penerapan otonomi daerah turut diberikan dukungan oleh perimbangan keuangan diantara pusat dan daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua daerah mempunyai PAD yang relatif besar untuk mendanai daerahnya, dengan demikian pemerintah memebrikan dana perimbangan guna mendanai kebutuhan daerah.

Selain PAD serta dana perimbangan, jumlah penduduk juga bisa jadi faktor yang menentukan besarnya angka belanja daerah. Jumlah penduduk akan mempengaruhi angka kebutuhan layanan publik, baik dibidang kesehatan, sosial, pendidikan, administrasi, keamanan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup.

Menilik penelitian terdahulu, Dahliah (2022) dan Fatimah et al., (2020) menyimpulkan yakni PAD memberi dampak positif serta signifikan pada belanja daerah. Kedua penelitian tersebut menampilkan yakni terjadinya peningkatan PAD akan menyebabkan meningkatnya belanja daerah begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut penelitian Handayani et al., (2022) justru menghasilkan kesimpulan yakni PAD tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Purwanto & Setyowati (2019) diperoleh kesimpulan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan relatif signifikan pada belanja daerah yang mempunyai arti bila dana perimbangan terjadi kenaikan dengan demikian belanja daerah juga akan mengalami peningkatan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian oleh Susilowati et al., (2021) yang memberikan penyimpulan yakni dana perimbangan memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan pada belanja daerah.

Beberapa penelitian yang meneliti jumlah penduduk pada Belanja Daerah, penelitian yang dilaksanakan oleh Handayani et al. (2022) dan Sulistiani & Mahardhika (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara jumlah penduduk pada Belanja Daerah. Temuan yang selaras juga didapat oleh penelitian Akan tetapi perihal terkait tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Dahliah (2022) yang memiliki kesimpulan yakni terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara jumlah penduduk pada Belanja Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mempunyai ketertarikan guna melakukan pengkajian lebih detail dengan melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022”**

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif dan menggunakan model regresi data panel guna melakukan analisis jumlah penduduk seluruh kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah. Analisisnya mencakup periode 2020 hingga 2022 dan mencakup total 29 kabupaten serta 6 kota. Teknik sampel yang dipakai yakni sampling jenuh. Pemilihan metode ini didasarkan pada strategi penelitian yang dilakukan Fadilah & Helmayunita (2020) dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang relatif terbatas.

Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder. Penelitian ini memakai pengumpulan data sekunder, yakni data laporan realisasi anggaran yang didapatkan dari website beberapa pemerintah daerah dan selanjutnya disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sumber data kependudukan diperoleh dari website Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini memakai belanja daerah sebagai variabel independen. Menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Belanja daerah yang digunakan mengacu pada agregat belanja daerah setiap kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah saat periode tahun 2020-2022.

Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 284 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” PAD yang digunakan merupakan penjumlahan pendapatan asli daerah tiap-tiap kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah periode tahun 2020-2022.

2) Dana Perimbangan

Menurut Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dana yang digunakan untuk tujuan perimbangan berasal dari agregat dana perimbangan yang dialokasikan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2020-2022.

3) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mengacu pada jumlah keseluruhan individu yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama minimal enam bulan atau mempunyai niat untuk tinggal, meskipun mereka belum mencapai ambang batas enam bulan. Jumlah penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2020-2022.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan teknik pengolahan data statistik dengan cara mengumpulkan dan mendeskripsikan data secara umum atau general tanpa bertujuan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Adapun analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi jumlah data, rata-rata median, nilai maksimal, minimal, serta standar deviasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	BD	PAD	DP	JP
Obv.	105	105	105	105
Mean	2.245.052.625.551	455.240.247.843	1.303.137.628.559	1.053.241
Median	2.198.880.662.286	383.892.971.961	1.314.230.524.439	1.019.840
Maximum	4.871.946.697.040	2.545.991.747.658	1.954.167.356.400	2.010.617

Minimum	798.353.191.714	219.539.400.332	522.042.585.441	121.526
Std				
Deviation	708.677.299.785	344.151.807.884	347.461.598.477	457.100

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa variabel belanja daerah, diperoleh rata-rata sebesar Rp2.245.052.625.551, median sebesar Rp2.198.880.662.286, nilai maksimum Rp4.871.946.697.040, nilai minimum sebesar Rp798.353.191.714. Pada variabel PAD, diperoleh rata-rata sebesar Rp455.240.247.843, median sebesar Rp383.892.971.961, nilai maksimum sebesar Rp2.545.991.747.658, dan nilai minimum sebesar Rp219.539.400.332. Pada variabel dana perimbangan, diperoleh rata-rata sebesar Rp1.303.137.628.559, median sebesar Rp1.314.230.524.439, nilai maksimum Rp1.954.167.356.400, dan nilai minimum sebesar Rp522.042.585.441. Pada variabel jumlah penduduk, diperoleh rata-rata sebesar 1.053.241, median sebesar 1.019.840, nilai maksimal yakni 2.010.617, serta nilai minimal yakni 121.526. Nilai standar deviasi dibawah dari nilai rerata pada masing-masing variabel yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan telah mewakili populasi.

Pemilihan Model

Uji Chow

Berlandaskan temuan uji chow diperoleh Prob. pada *cross-section* F yakni $0,0001 < 0,05$ maka bisa dilakukan pengambilan kesimpulan yakni FEM yakni singkatan dari *Fixed Effects Model* lebih baik dibandingkan CEM yakni singkatan dari *Common Effects Model* dan selanjutnya dilanjutkan dengan uji hausman.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.012946	(34,67)	0.0001
Cross-section Chi-square	97.419751	34	0.0000

Sumber: Eviews 12, data diolah (2024)

Uji Hausman

Berlandaskan hasil uji hausman diperoleh hasil Prob. pada *cross-section* F yakni $0,0039 < 0,05$ maka bisa dilakukan pengambilan kesimpulan *FEM* lebih baik daripada dengan *REM* yakni singkatan dari *Random Effects Model* dengan demikian bisa dipastikan yang terpilih *Fixed Effects Model* dan tidak perlu dilakukan uji legrange multiplier.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.969465	3	0.0000

Sumber: Eviews 12, data diolah (2024)

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Nilai koefisien korelasi antara PAD dengan dana perimbangan menunjukkan angka $0,377 < 0,85$, PAD dengan jumlah penduduk menunjukkan angka $0,42 < 0,85$, dan dana perimbangan dengan jumlah penduduk menunjukkan angka $0,817 < 0,85$. Koefisien korelasi antar variabel dependen masih dibawah angka *rule of thumb* sebesar 0,85 (Widarjono, 2018) dengan

demikian bisa dilakukan pengambilan kesimpulan variabel dependen pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	PAD	DP	JP
PAD	1.000000	0.377407	0.420080
DP	0.377407	1.000000	0.817818
JP	0.420080	0.817818	1.000000

Sumber: Eviews 12, data diolah (2024)

Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4.4 nilai signifikansi yang ditunjukkan pada kolom Prob. variabel PAD mempunyai nilai signifikansi yakni $0,3722 > 0,05$, dana perimbangan mempunyai nilai signifikansi yakni $0,9697 > 0,05$, serta jumlah penduduk mempunyai nilai signifikansi yakni $0,0937 > 0,05$. Ketiga variabel dependen dalam penelitian ini memiliki nilai Sig. $> 0,05$ atau 5%, dengan demikian bisa dilakukan pengambilan kesimpulan yakni variabel yang dipakai pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.00E+11	1.12E+11	0.898473	0.3722
PAD	0.003053	0.080138	0.038095	0.9697
DP	0.082079	0.055441	1.480491	0.1434
JP	-0.111763	0.065734	-1.700234	0.0937

Sumber: Eviews 12, data diolah (2024)

Uji Hipotesis

Persamaan Regresi

Korelasi diantara variabel dependen dengan independen pada suatu penelitian dilakukan penggambaran dengan model persamaan regresi. Persamaan regresi data panel memodelkan pengaruh anatar variabel diantara data runtut waktu serta data silang.

Tabel 6. Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.42E+11	2.59E+11	2.870795	0.0055
PAD	0.940676	0.185516	5.070590	0.0000
DP	0.489585	0.128344	3.814645	0.0003
JP	0.331714	0.152172	2.179864	0.0328

Sumber: Eviews 12, data dilakukan pengolahan (2024)

Berlandaskan tabel 4.5 maka persamaan regresi penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$BD = 742197521260 + 0,940676 PAD + 0,489585 DP + 0,331714 JP + e$$

Uji Parsial (t)

Uji t dipakai guna melakukan uji hipotesis dalam analisis regresi parsial, untuk mengecek pengaruh satu variabel independen pada satu variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 7. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.42E+11	2.59E+11	2.870795	0.0055
PAD	0.940676	0.185516	5.070590	0.0000
DP	0.489585	0.128344	3.814645	0.0003
JP	0.331714	0.152172	2.179864	0.0328

Sumber: Eviews 12, data dilakukan pengolahan (2024)

Nilai t hitung PAD (X1) yang ditunjukkan dalam kolom *t-statistic* menunjukkan hasil $5,07 > t$ tabel yakni 1,9837 dan nilai Prob. $0,000 < 0,05$, perihal ini mempunyai arti H_{01} ditolak serta H_{a1} diterima. Bisa dilakukan pengambilan kesimpulan PAD mempunyai pengaruh positif signifikan pada belanja daerah.

Nilai t hitung dana perimbangan (X2) yang ditunjukkan dalam kolom *t-statistic* menunjukkan hasil $3,814 > t$ tabel yakni 1,9837 dan nilai Prob. $0,0003 < 0,05$, perihal ini mempunyai arti H_{02} ditolak serta H_{a2} diterima. Bisa dilakukan pengambilan kesimpulan yakni dana perimbangan mempunyai pengaruh positif signifikan pada belanja daerah.

Nilai t hitung jumlah penduduk (X3) yang ditunjukkan dalam kolom *t-statistic* menunjukkan hasil $2,179 > t$ tabel yakni 1,9837 dan nilai Prob. $0,0328 < 0,05$, perihal ini mempunyai arti H_{02} ditolak serta H_{a2} diterima. Bisa dilakukan pengambilan kesimpulan yakni jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif signifikan pada belanja daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *adjusted R²* yang didapatkan dari hasil pengujian yakni 0,979661 yang menunjukkan yakni PAD, dana perimbangan, serta belanja daerah mampu menjelaskan belanja daerah sebesar 97.79%, sedangkan sisa 2,21% diberikan penjelasan oleh variabel lain selain tiga variabel tersebut.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

R-squared	0.986897	Mean dependent var	2.25E+12
Adjusted R-squared	0.979661	S.D. dependent var	7.09E+11
S.E. of regression	1.01E+11	Akaike info criterion	53.79053
Sum squared resid	6.84E+23	Schwarz criterion	54.75101
Log likelihood	-2786.003	Hannan-Quinn criter.	54.17973
F-statistic	136.3887	Durbin-Watson stat	3.001758
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 12, data diolah (2024)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Temuan yang telah dilaksanakan menunjukkan yakni PAD mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada belanja daerah pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah tahun 2020-2022. Semakin tinggi PAD dengan demikian semakin tinggi pula belanja daerah, sama halnya kebalikannya apabila angka PAD terjadi penurunan dengan demikian belanja daerah akan terjadi penurunan.

PAD mempunyai peran yang sangat penting dalam mencukupi keperluan belanja suatu daerah. Tingginya angka PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai belanja daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Adanya PAD memberikan daerah kewenangan guna memberikan pendanaan otonomi daerah selaras dengan potensi yang terdapat di daerah.

Pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah, PAD selalu mengalami peningkatan tiap-tiap tahunnya dan didominasi oleh pajak daerah yang pada tahun 2020 hingga 2022 selalu menyumbang lebih dari lima puluh persen dari total PAD. Selanjutnya, ketentuan hukum lebih lanjut mengenai PAD, diikuti dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pada akhirnya retribusi daerah. Pajak daerah merupakan komponen utama belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah..

Temuan dari penelitian ini juga tercermin dari peningkatan rerata PAD pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2022 sebesar 14,65% juga diikuti oleh kenaikan belanja daerah pada rentang tahun yang sama sebesar 8,18%. Kota Semarang yang mencatatkan PAD paling tinggi di Prov. Jawa Tengah pada tahun 2022 yakni sebesar Rp2.545.991.747.658 juga mencatatkan belanja daerah tertinggi yakni sebesar Rp4.871.946.697.040. Disisi lain Kota Salatiga yang memiliki PAD terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yakni sebesar Rp263.475.949.166 juga mencatatkan belanja daerah terendah yang hanya sebesar Rp932.071.471.274.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang diselenggarakan oleh Fatimah et al. (2020), Susilowati et al. (2021), Allya & Rahmawati (2023), Fadilah & Helmayunita (2020), Dahliah (2022), Malau et al. (2020), Purwantoro & Setyowati (2019), Pertiwi & Mahardhika (2019), Amelia et al. (2019), Zahari (2020), Andrean & Sari (2020), dan Nailufar & Sufitrayai (2019) yang juga menyatakan bahwa PAD memberikan pengaruh positif signifikan pada belanja daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Temuan uji yang telah dilakukan menampilkan yakni dana perimbangan mempunyai dampak positif serta signifikan pada belanja daerah pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah tahun 2020-2022. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima dengan demikian semakin tinggi pula belanja daerah, sama hanya kebalikannya bila dana perimbangan mengalami penurunan dengan demikian belanja daerah juga akan terjadi penurunan.

Dana perimbangan ialah satu diantara wujud dari penerapan desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dana perimbangan berasal dari pendapatan APBN dan dilakukan pengalokasian pada daerah guna memberikan pendanaan keperluan daerah. Pemberian dana perimbangan sendiri dimaksudkan guna pemerataan keuangan antar daerah. Sehingga hasil penelitian ini yang mengungkapkan yakni dana perimbangan mempunyai dampak pada belanja daerah sesuai dengan maksud serta tujuan dari pemberian dana perimbangan.

Hasil dari penelitian ini juga tercermin dari peningkatan rata-rata dana perimbangan pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai 2022 sebesar 7,9% juga diikuti oleh kenaikan belanja daerah pada rentang tahun yang sama sebesar 8,18%. Kabupaten Cilacap yang menerima dana perimbangan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yakni sebesar Rp1.954.167.356.400 mencatatkan belanja daerah tertinggi ketiga yakni sebesar Rp3.402.035.620.730,27, lebih rendah daripada Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas. Disisi lain Kabupaten Magelang yang memiliki dana perimbangan terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yakni sebesar Rp525.532.389.944 mencatatkan belanja daerah terendah ketiga yang hanya sebesar Rp1.039.501.502.733, angka tersebut hanya lebih tinggi dibandingkan Kota Salatiga dan Kota Pekalongan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Purwantoro & Setyowati (2019), Pertiwi & Mahardhika (2019), dan Fatimah et al. (2020) yang juga mengungkapkan yakni dana perimbangan memberikan pengaruh positif signifikan pada belanja daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan yakni jumlah penduduk memiliki pengaruh positif serta signifikan pada belanja daerah pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah tahun 2020-2022. Semakin banyak jumlah penduduk yang diterima dengan demikian semakin tinggi pula belanja daerah, begitu juga kebalikannya bila jumlah penduduk terjadi penurunan dengan demikian belanja daerah juga akan terjadi penurunan.

Jumlah penduduk akan mempengaruhi angka kebutuhan layanan publik, baik dibidang kesehatan, sosial, pendidikan, administrasi, keamanan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup. Semakin banyak jumlah penduduk di sebuah daerah dengan demikian semakin banyak pula layanan publik yang dibutuhkan. Apabila jumlah penduduk tidak dapat diimbangi dengan kuantitas layanan publik maka dapat memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemenuhan layanan publik ini menggunakan anggaran belanja daerah yang dianggarkan pada APBD, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk memengaruhi belanja daerah.

Temuan dari penelitian ini tercermin dari peningkatan rata-rata dana perimbangan pada kota/kabupaten di Prov. Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai 2022 sebesar 1,41% juga diikuti oleh kenaikan belanja daerah pada rentang tahun yang sama sebesar 8,18%. Kabupaten Brebes yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak di Prov. Jawa Tengah pada tahun 2022 yakni sebanyak 2.010.617 jiwa mencatatkan belanja daerah tertinggi keempat yakni sebesar Rp3.091.285.559.556, lebih rendah daripada Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Disisi lain Kabupaten Magelang yang memiliki jumlah penduduk terendah di Prov. Jawa Tengah pada tahun 2022 yakni sebanyak 121.675 jiwa mencatatkan belanja daerah terendah ketiga yang hanya sebesar Rp1.039.501.502.733, angka tersebut hanya lebih tinggi dibandingkan Kota Salatiga dan Kota Pekalongan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Handayani et al., (2022) dan Sulistiani & Mahardhika (2020) yang juga mengungkapkan yakni jumlah penduduk memberi dampak positif signifikan pada belanja daerah.

Kesimpulan

Berlandaskan hasil pengujian yang peneliti lakukan bisa dilakukan pengambilan kesimpulan yakni secara parsial PAD, dana perimbangan, serta jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022.

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penelitian serupa dengan sampel kota/kabupaten di provinsi selain Jawa Tengah atau dapat menggunakan Pemda pada tingkat provinsi. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan variabel yang lebih spesifik seperti pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dana bagi hasil, serta dana alokasi umum, serta variabel lain yang merupakan turunan dari PAD atau dana perimbangan dikarenakan *adjusted R²* pada penelitian ini telah mencapai angka 0,979.

Referensi

Allya, H. R., & Rahmawati, F. (2023). Flypaper Effect pada Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1). <https://doi.org/10.35906/jep.v9i1.1493>

- Amelia, D., Arfan, M., & Abdullah, S. (2019). Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan Sebagai Pemeditasi Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Outcomes Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1). <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13822>
- Andrean, A., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.191>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2). <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, 18(3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SOROT*, 17(1). <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Malau, Y. N., Lase, W. L., Sagala, V. C. B., & Lestari, D. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU DAN DBH terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh 2013-2017. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i08.p02>
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1126>
- Pertiwi, D., & Mahardhika, A. S. (2019). Anteseden Senjangan Anggaran Desa Di Kabupaten Kebumen. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i1.1614>
- Purwantoro, & Setyowati, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. In *JBE* (Vol. 26, Issue 1).
- Sugiyono. (2019). Metode Peneelitan Pendidikan. In *Bandung:Alfabeta*.
- Sulistiani, E., & Mahardhika, A. S. (2020). Anteseden Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Forum Ekonomi*, 22(2), 326–333.

- Susilowati, D., April Dayanti Sitinjak, C., & Juwari, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1). <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.149>
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya. In *Jakarta: UPP STIM YPKN* (Issue 5).
- Zahari, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1).